

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2027**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Aalamiin kami panjatkan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2027.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kota Pekalongan.

Atas kerjasama semua pihak akhirnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027, dapat disusun dan menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan di Kota Pekalongan Tahun 2027.

Pekalongan, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN



LILI SULISTYAWATI, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700711 199603 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra PD	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3. Program dan Kegiatan	26
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V. PENUTUP	36
5.1. Catatan Penting	36
5.2. Kaidah Pelaksanaan	36
5.3. Rencana Tindak Lanjut	37

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

I.1.1. PENGERTIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ini mengacu pada kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan yaitu Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan berlandaskan akhlaqul karimah.

I.1.2. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan.

Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup : Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Dilaksanakan oleh Kepala Daerah berkoordinasi dengan Bapperida Kota Pekalongan dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Awal.

Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan perkara tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam perkara tentang RKPD.

6. Penetapan.

Bapperida Kota Pekalongan menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan perkara. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menjabarkan rencana kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Daerah, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.

I.1.3.KETERKAITAN ANTARA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dari rancangan awal Renja sampai akhir dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, rancangan awal RKPD, dan Rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan.

1. Berpedoman pada renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapperida Kota Pekalongan untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin Rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

I.2. LANDASAN HUKUM

I.2.1. KETENTUAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH.

Berdasarkan Perda 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan, serta Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, Kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sebagai berikut :

Kedudukan

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana kewenangan daerah di bidang Pertanian dan Pangan sesuai dengan arah kebijakan Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan.

Tugas

Tugas melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan pangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
5. penyusunan program penyuluhan pertanian dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
6. penataan dan pengawasan prasarana pertanian;

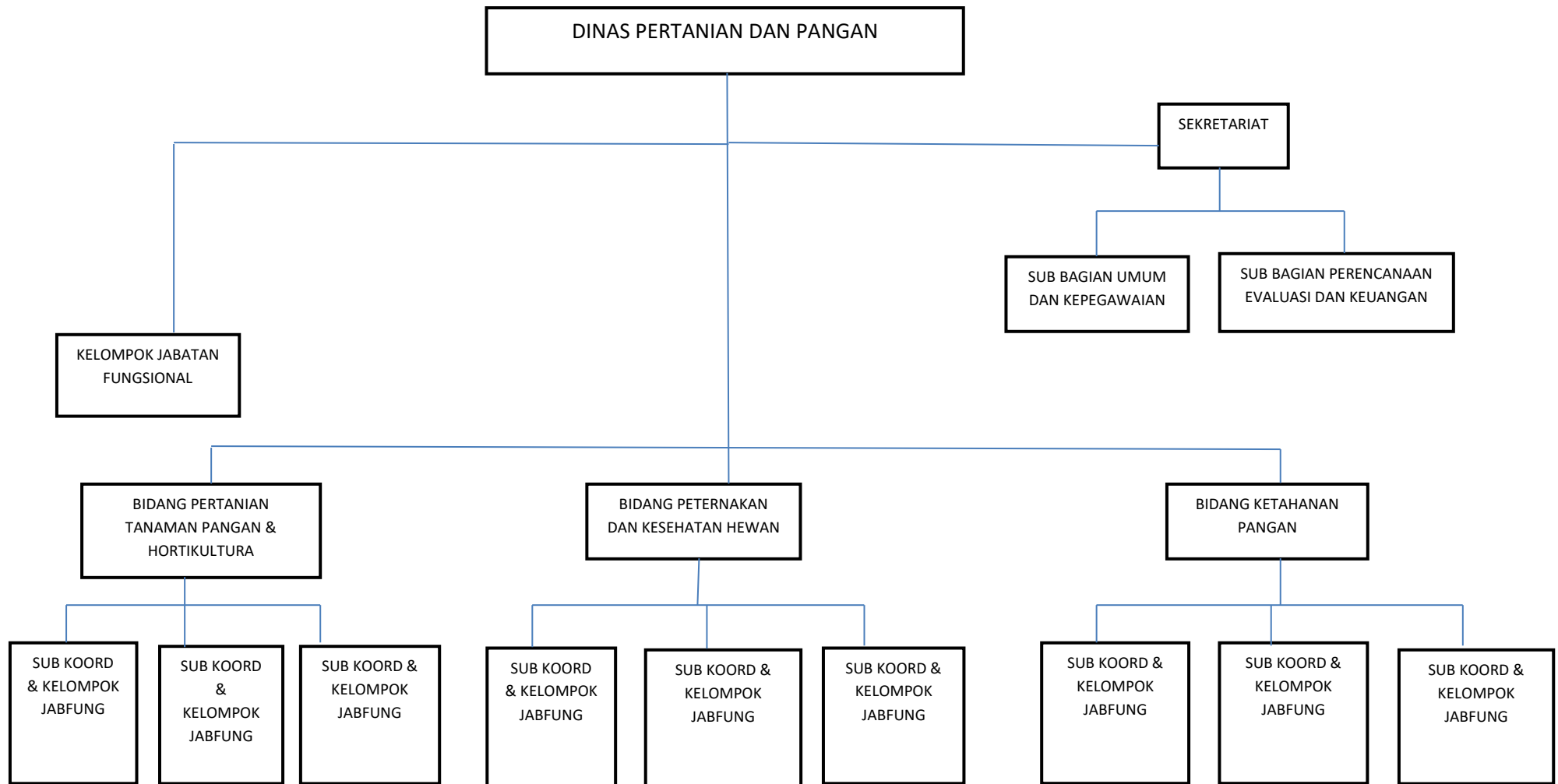
7. pembinaan produksi di bidang pertanian dan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
8. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
9. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
10. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
11. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
12. pelaksanaan administrasi program dan kegiatan Dinperpa, dan ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan didukung oleh Pejabat-Pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretariat, Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Ketahanan Pangan. Jajaran komponen beserta unit satuan kerja masing-masing, diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d. Bidang Ketahanan Pangan.
- e. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian & Pangan



Sebagaimana Gambar I.1, masing- masing unsur dari Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas :

Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.

b. Fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, di urusan pertanian dan ketahanan pangan ;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi ;
3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan ;
4. Pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan negara ; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tugas

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

b. Fungsi

1. Perumusan program kerja bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
2. Penyusunan kebijakan teknis lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
3. Penyelenggaraan program peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi,

- pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
5. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi di bidang produksi, tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
 6. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
 7. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Tugas :

menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Fungsi

1. perumusan program kerja bidang produksi dan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan serta kesehatan hewan;
2. penyusunan kebijakan di bidang produksi dan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan serta kesehatan hewan;
3. penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
4. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
5. penyelenggaraan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
6. penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis perijinan/sertifikasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
7. penyelenggaraan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bidang ketahanan pangan

a. Tugas

Menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan.

b. Fungsi

1. perumusan program kerja bidang ketahanan pangan;
2. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
3. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah; Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. Pengkoordinasian pengelolaan Keamanan Pangan kabupaten/ kota;
5. Pengkoordinasian penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Penyelenggaraan evaluasi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
7. Penyelenggaraan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
8. Pengkoordinasian penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota;
9. Pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Keamanan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
11. Pengkoordinasian upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seksi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, Keamanan Pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
12. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
13. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

I.2.2. KETENTUAN TENTANG PERENCANAAN.

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah:

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

I.2.3. KETENTUAN TENTANG PENGANGGARAN.

Peraturan yang menjadi pedoman dalam penganggaran adalah :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas

Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra PD secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan :

1. Memberikan gambaran kemampuan OPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/ Pimpinan Instansi.
2. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas- tugas OPD serta indikator atau ukuran keberhasilan/ atau kegagalan pada tahun 2027.
3. Memberikan arah/ acuan dalam penyusunan program/ kegiatan pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027.

I.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan pangan Kota Pekalongan selama Tahun 2025 dan tahun berjalan 2026 serta perkiraan target anggaran tahun 2027.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan renja Perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil- hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Rencana Kerja PD dan Renstra sampai dengan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 akan dijabarkan dalam tabel lebih lanjut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian renstra PD s/d Tahun 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

No .	Indikator Program/Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2021-2026	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Realisasi Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025	Persentase Capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2025	Realisasi 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
1	Persentase cadangan pangan daerah	Persen	4,3	4,8	45,33	20,00	51,98	51,98	259,91	Tercapai
2	Persentase kecamatan tahan pangan di kota Pekalongan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Persentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	Persen	80	88	98,53	86,40	92,07	92,07	106,57	Tercapai
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.										
4	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,56	55,84	60,27	55,78	62,15	62,15	111,42	Tercapai
5	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	184,46	203,65	273,75	199,66	286,27	286,27	143,38	Tercapai
6	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	5,00	5,00	-10	5,00	45,45	45,45	909,09	Tercapai
8	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
9	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	Persen	0	100	27,16	100	100,19	100,19	100,19	Tercapai
10	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	Persen	0	5,00	4,76	5,00	8,70	8,70	173,91	Tercapai
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.										
11	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100,01	100,01	100,01	Tercapai

12	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	101,42	101,42	101,42	Tercapai
13	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	116,28	116,28	116,28	Tercapai

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Adapun hasil pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase ketersediaan pangan (tersedia cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Tidak ada	-Jumlah cadangan pangan. -Jumlah kebutuhan pangan	45,33	50,00	52,50	55,00	45,33	50,00	52,50	55,00	
2.	Produktivitas pertanian perhektar pertahun	Tidak ada	-Jumlah produksi pertanian pangan perhektar pertahun -Luas panen	7,2	7,1	7,3	7,3	7,2	7,1	7,3	7,3	
3.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit	Tidak ada	-Jumlah (t)-(t-1) / (t-1)	32,26	100	100	100	32,26	100	100	100	

	hewan menular											
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan pangan Kota Pekalongan dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat di Kota Pekalongan, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kota Pekalongan yang masih belum mencapai skor 100. Hal ini perlu diatasi dengan berbagai upaya diantaranya yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta peningkatan ketrampilan dalam pengolahan pangan berbasis pangan lokal dan berbagai upaya diversifikasi pangan lainnya baik melalui sosialisasi, lomba maupun pelatihan.
2. Jumlah cadangan pangan daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang belum sesuai dengan jumlah yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
3. Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah dan lintas sektoral dalam pembangunan ketahanan pangan.
4. Masih ditemukannya pangan segar tidak aman di pasaran. Perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan rutin khususnya di pasar-pasar tradisional. Selain itu juga perlu terus dilakukan edukasi terkait keamanan pangan dengan sasaran masyarakat pada umumnya.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk olahan pangan variasi. Hal ini perlu diatasi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan B2SA dan upaya meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya diversifikasi pangan melalui sosialisasi, lomba dan pelatihan. untuk olahan pangan variasi melalui sosialisasi dan pelatihan;
6. Faktor alam berupa banjir hujan/ air pasang (rob), mengakibatkan lahan pertanian yang terdampak rob dengan kadar salinitas yang lebih tinggi dari normal. Solusi

permasalahan tersebut dengan mengajukan bantuan bibit padi tahan salinitas tinggi ke Pemerintah Pusat sebagai upaya agar petani yang terdampak rob tetap bisa melakukan usaha tani ;

7. Lokasi Kota Pekalongan yang berada di pesisir Pantai, mengakibatkan pengairan air irigasi pertanian mengandalkan kiriman dari wilayah sekitar, sehingga saat musim kemarau, volume air yang sampai ke Pekalongan jumlahnya berkurang, sementara kondisi irigasi yang ada juga sudah banyak yang mengalami penyempitan/ pendangkalan.
8. Kesadaran para petani untuk menanam secara serentak dalam 1 (satu) area yang kurang, sehingga resiko serangan hama dimungkinkan silih berganti.
9. Pemanfaatan alsintan yang masih terbatas, dimana petani masih mengandalkan tenaga manusia, dari pembenihan hingga panen, yang membutuhkan biaya besar, sementara tenaga kerja sudah mulai berkurang.
10. Permintaan alih fungsi lahan pertanian yang tinggi, terutama untuk penyediaan rumah tinggal dan tempat usaha, sehingga perlu dilakukan pencermatan kondisi lapangan dan hanya memberikan rekomendasi AFL apabila lahan dimaksud peruntukan diluar non pertanian sesuai RTRW Kota Pekalongan, sehingga perlu ada pengawalan bersama dinas teknis lainnya dalam menjaga lahan sawah dilindungi (LSD)
11. Penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi masih kurang, karena itu perlu ada upaya mendorong semua petani untuk menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi dan bersinergi dengan pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan di lapangan ;
12. Terbatasnya jumlah Kios Penyedia Pupuk Lengkap (KPL) di Kota Pekalongan, yang tutup pada tahun ini adalah KPL Tani Berhasil dan Wahana Tani serta di akhir tahun segera menyusul KUD Pekalongan, sehingga hanya ada 2 (dua) KPL.
13. Menyempitnya lahan budidaya ternak di wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu dilakukan intensifikasi usaha ternak dengan memanfaatkan teknologi berwawasan lingkungan ;
14. Merebaknya isu penyakit hewan menular baru (New Emerging Disease), maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dengan konsep One Health, terpadu bersama instansi terkait kesehatan dan lembaga pendidikan ;
15. Penjualan bahan pangan asal hewan yang kurang memenuhi syarat ASUH di pasar tradisional, terutama pasar Banjarsari. Permasalahan ini diatasi dengan

- meningkatkan peran masyarakat dan aparaturnya dalam proses penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal ;
16. Masih adanya pemilik lahan yang membiarkan lahan pertanian terbengkalai karena berbagai alasan seperti lokasi tersebut sudah tidak memiliki jaringan irigasi, atau sengaja untuk persiapan alih fungsi.

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan adalah antara lain :

1. Kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan alsintan ;
2. Terbangunnya bendung gerak di wilayah utara yang mengakibatkan wilayah-wilayah yang dulu tergenang mulai mongering, sehingga memungkinkan untuk difungsikan kembali, tentunya dengan penanganan khusus termasuk untuk mengembalikan lahan eks pertanian ;
3. Adanya kebijakan penggunaan KTP selain Kartu tani, sehingga memberikan kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai wilayah layanan masing- masing KPL ;
4. Penambahan alokasi pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam budidaya tanaman pangan dengan harapan tidak ada lagi terjadinya kelangkaan pupuk ;
5. Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikuti edukasi pertanian sejak dini, dengan mengirimkan siswa PAUD/TK/SD ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ;

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD diperlukan dengan tujuan agar OPD dapat membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan OPD pada Tahun 2027.

Adapun hasil perbandingan review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

Rancangan awal RKPD				Hasil analisis kebutuhan				Catatan penting
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
		Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
3	4	8	9	3	4	8	9	

Dinas Pertanian dan Pangan				6.140.831.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan				6.140.831.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				419.595.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				419.595.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				419.595.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				419.595.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,62 angka	351.675.000,00		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,62 angka	351.675.000,00		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen	32.070.000,00		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen	32.070.000,00		
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35 Keluarga	12.500.000,00			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35 Keluarga	12.500.000,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	9.270.000,00			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	9.270.000,00		
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	10.300.000,00			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	10.300.000,00		
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	100 persen	175.100.000,00		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	100 persen	175.100.000,00		
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	175.100.000,00			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	175.100.000,00		
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang melaksanakan optimalisasi	3 kegiatan	144.505.000,00		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang melaksanakan optimalisasi	3 kegiatan	144.505.000,00		
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	3.605.000,00			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	3.605.000,00		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	140.900.000,00			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	140.900.000,00		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan tahan pangan/sangat tahan pangan	96,3 persen	23.175.000,00		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan tahan pangan/sangat tahan pangan	96,3 persen	23.175.000,00		
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Rencana Aksi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	23.175.000,00		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Rencana Aksi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	23.175.000,00		
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					

	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	23.175.000,00		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	23.175.000,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100 persen	44.745.000,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100 persen	44.745.000,00	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	26 Sampel	44.745.000,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	26 Sampel	44.745.000,00	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	22.245.000,00		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	22.245.000,00	
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				
	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	22.500.000,00		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	22.500.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.721.236.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.721.236.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.721.236.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.721.236.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen	5.031.156.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen	5.031.156.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	20.480.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	20.480.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.033.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.033.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.800.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.800.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.647.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.647.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.145.076.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.145.076.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.090.114.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.090.114.000,00	
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.200.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.200.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.762.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.762.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	399.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	399.000.000,00	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	170.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	170.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.500.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.500.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	160.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	160.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	372.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	372.000.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	140.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	140.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	230.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	230.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	89.600.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	89.600.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	65.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	65.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	600.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	600.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	24.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	24.000.000,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	63,27 Miliar Rupiah	273.680.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	63,27 Miliar Rupiah	273.680.000,00	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen	129.500.000,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen	129.500.000,00	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	10.000.000,00	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	119.500.000,00		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	119.500.000,00	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen	59.760.000,00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen	59.760.000,00	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	59.760.000,00		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	59.760.000,00	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	71.050.000,00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	71.050.000,00	

Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				
	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	25.750.000,00		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	25.750.000,00	
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				
	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	45.300.000,00		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	45.300.000,00	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Pelayanan ULIB	100 persen	13.370.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Pelayanan ULIB	100 persen	13.370.000,00	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				
	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	13.370.000,00		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	13.370.000,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian dan peternakan dalam kondisi baik	67,57 persen	94.200.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian dan peternakan dalam kondisi baik	67,57 persen	94.200.000,00	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Unit	94.200.000,00	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Unit	94.200.000,00	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	94.200.000,00		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	94.200.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular yang Tertangani	100 persen	277.800.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular yang Tertangani	100 persen	277.800.000,00	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	650 Kasus	46.300.000,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	650 Kasus	46.300.000,00	
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	46.300.000,00		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	46.300.000,00	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.750.000,00	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.750.000,00	
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				

	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan	10.300.000,00		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan	10.300.000,00	
Pengawasan Peredaran Produk Hewan				Pengawasan Peredaran Produk Hewan				
	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	15.450.000,00		Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	15.450.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.450.000,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.450.000,00	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				
	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	15.450.000,00		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	15.450.000,00	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen	190.300.000,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen	190.300.000,00	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				
	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	20.600.000,00		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	20.600.000,00	
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	1 Unit Usaha	169.700.000,00		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	1 Unit Usaha	169.700.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	12.400.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	12.400.000,00	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	4 Kali	12.400.000,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	4 Kali	12.400.000,00	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4 Ha	12.400.000,00		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4 Ha	12.400.000,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan nilai kelompok tani per tahun	52 persen	32.000.000,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan nilai kelompok tani per tahun	52 persen	32.000.000,00	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen	32.000.000,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen	32.000.000,00	
Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa				Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa				

	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	32.000.000,00		Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	32.000.000,00	
			6.140.831.000,00				6.140.831.000,00	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Usulan program/ kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 merupakan perwujudan dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun dari pelaksanaan Musrenbang.

Adapun usulan program/ kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel sebagaimana dibawah ini :

Program/ Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2027

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/volume	Catatan
	Belum ada usulan.				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

A. Telaah terhadap arah kebijakan renstra Provinsi Jawa Tengah.

Arah kebijakan Pemprov Jateng terkait pertanian dan ketahanan pangan berfokus pada peningkatan dan perlindungan lahan pertanian, modernisasi infrastruktur irigasi, pengendalian inflasi melalui subsidi dan optimalisasi distribusi, serta pengembangan aglomerasi berbagai sektor untuk menciptakan ekonomi baru dan menunjang ketahanan pangan nasional. Selain itu, ada juga upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui fasilitasi kredit dan koperasi, serta pemanfaatan teknologi dan pertanian organik untuk efisiensi produksi dan keberlanjutan.

1. Menjaga dan Melindungi Lahan Pertanian

Melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B):

Menjaga lahan pertanian abadi dari alih fungsi menjadi zona pembangunan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, di mana Jateng telah mencapai realisasi tertinggi secara nasional dalam melindungi lahan ini.

Mempertahankan Sawah Sebagai Lumbung Pangan Nasional:

Menguatkan Jawa Tengah sebagai penopang utama program swasembada pangan nasional dengan mempertahankan lahan produktif dan menjadikannya daerah subur yang memberi kontribusi nyata.

2. Peningkatan Produktivitas dan Modernisasi Pertanian

Modernisasi Irigasi:

Memperbaiki saluran air primer, sekunder, dan tersier, serta menyosialisasikan modernisasi sistem irigasi, seperti pemasangan sistem irigasi yang mampu mendukung petani menanam lebih dari satu kali dalam setahun.

Pengembangan Pertanian Organik:

Mendorong penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah dan ketahanan terhadap hama, serta memanfaatkan limbah ternak untuk produksi yang lebih efisien dan produk bernilai tinggi.

Dukungan Inovasi dan Teknologi:

Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan inovasi dan menuntaskan masalah pertanian, serta memanfaatkan potensi data pangan digital.

3. Pengendalian Inflasi dan Kesejahteraan Petani

Program Subsidi Pangan Murah:

Mengurangi lonjakan harga komoditas pangan dengan program subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Optimalisasi Pasokan dan Distribusi:

Membangun ekosistem ekonomi digital dan mendirikan Food Hub modern untuk mempermudah pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran produk makanan.

Fasilitasi Kredit dan Koperasi:

Sejahterakan petani dengan memfasilitasi kredit dan mengoptimalkan peran koperasi untuk memberikan kemudahan bagi petani.

4. Peningkatan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Pengembangan Aglomerasi Wilayah:

Mengarahkan pembangunan pada pengembangan wilayah aglomerasi yang melibatkan kerja sama berbagai bupati untuk menciptakan ekonomi baru di berbagai sektor (pertanian, perikanan, industri).

Mendorong Penganekaragaman Pangan:

Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA)

B. Telaah terhadap arah kebijakan renstra Kementerian Pertanian.

Arah kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait pertanian dan ketahanan pangan fokus pada peningkatan produksi dan ketersediaan pangan melalui modernisasi pertanian dan optimalisasi lahan, penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi, serta peningkatan kesejahteraan petani dan mitigasi risiko bencana. Ini dilakukan dengan pengembangan komoditas strategis, pemanfaatan teknologi, hilirisasi industri pertanian, dan penguatan sistem penyuluhan dan kemitraan.

1. Peningkatan Ketersediaan dan Produksi Pangan

Modernisasi Pertanian:

Menerapkan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan bibit unggul, pupuk yang tepat, dan pestisida yang efisien.

Optimalisasi Lahan:

Melakukan optimalisasi lahan rawa, pompanisasi lahan tadah hujan, dan pencetakan sawah baru di wilayah-wilayah potensial seperti Papua Selatan, Kalsel, Kalteng, dan Sumsel.

Pengembangan Komoditas Unggulan:

Meningkatkan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan daging.

Pengembangan Pangan Beragam:

Mendorong pengembangan sumber daya lokal dan penganekaragaman jenis pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

2. Penguatan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Penguatan Sistem Distribusi:

Memastikan kelancaran distribusi pangan dari petani ke pasar hingga ke tangan konsumen.

Stabilitas Harga:

Menerapkan kebijakan harga dan pemasaran yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjamin pendapatan petani.

3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Gizi

Penganekaragaman Konsumsi:

Memperbaiki kualitas konsumsi dan gizi masyarakat melalui program-program yang mendukung pola makan sehat dan bergizi.

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Kapasitas Petani:

Memberikan penyuluhan, pelatihan, dan informasi teknologi kepada petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

Kemitraan Strategis:

Membangun kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperlancar distribusi.

5. Mitigasi Risiko dan Ketahanan Pangan

Antisipasi Bencana:

Melakukan mitigasi terhadap gangguan ketahanan pangan, terutama akibat bencana alam, perubahan iklim, dan serangan hama penyakit.

Pembangunan Berkelanjutan:

Mendorong pertanian berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.

6. Hilirisasi Komoditas Pertanian

Peningkatan Nilai Tambah:

Mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor ekonomi lainnya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian dan pangan selama 1 (satu) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan yaitu tersusunnya sasaran strategis, program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Tujuan dikembangkan berdasarkan kriteria :

- Akseptabilitas, dapat diterima oleh seluruh stakeholders
- Fleksibilitas, mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan
- Dapat diukur
- Pendorong kinerja
- Kesesuaian dengan visi dan misi
- Mudah dipahami

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menetapkan tujuan masing-masing misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan persyaratan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang bersifat idealistik mengandung nilai-nilai dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan akan mempertajam focus pelaksanaan fungsi lembaga dan menggerakkan prioritas semua kebijakan program maupun kegiatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu gambaran dari suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Sasaran untuk memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur dan dicapai.

Keberhasilan pencapaian berbagai sasaran sangat penting ditinjau untuk :

- Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ;
- Menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Selanjutnya untuk menjamin keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 adalah Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan guna memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- 2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan;
- 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Uraian Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan guna memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Meningkatnya Nilai Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	354,74 juta rupiah
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,59 angka
	Indeks kepuasan masyarakat		Nilai SAKIP OPD	76,54 indeks

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan kegiatan dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

- 1. Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2027.
- 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2027.
- 3. Prioritas pengembangan system pertanian dan pangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, ketahanan pangan, peternakan). Maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan program

Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan, maka disusun rencana program dan kegiatan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program dan kegiatan. Dalam merumuskan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya, antara lain :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Visi dan misi Walikota Pekalongan Tahun 2027 ditetapkan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ;
3. Program Nasional Kementerian/ Lembaga terkait dalam rangka percepatan mandiri pangan/ ketahanan pangan ;
4. Keresasian dan keterpaduan pembangunan lintas sector pertanian dan ketahanan pangan dengan sector lain ;
5. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan ;
6. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya pertanian yang tersedia.

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 sebagai berikut :

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Kerja Tahun 2027	
							Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	8	9
					Dinas Pertanian dan Pangan			6.140.831.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			419.595.000,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			419.595.000,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,62 angka	351.675.000,00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen	32.070.000,00
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	100 persen	175.100.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang melaksanakan optimalisasi	3 kegiatan	144.505.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan tahan pangan/sangat tahan pangan	96,3 persen	23.175.000,00

[illegible]

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Rencana Kerja Tahun 2027				catatan pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
							Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumbe r Dana		Targe t	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
2					3	4	8	9	10	11		15	16	
					Dinas Pertanian dan Pangan			6.140.831.000,00					6.568.144.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			419.595.000,00					437.832.000,00	
2	0 9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			419.595.000,00					437.832.000,00	
2	0 9	0 3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,62 angka	351.675.000,00				-	366.050.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen	32.070.000,00				-	35.157.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 1	000 7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	35 Keluarga	12.500.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			15.000.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 1	001 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	9.270.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			9.548.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 1	001 6	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	10.300.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			10.609.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	100 persen	175.100.000,00				-	180.353.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 2	000 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	175.100.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			180.353.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang melaksanakan optimalisasi	3 kegiatan	144.505.000,00				-	150.540.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 4	000 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	3.605.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			3.713.000,00	
2	0 9	0 3	2.0 4	000 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									

						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	140.900.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		146.827.000,00
2	0	0			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan tahan pangan/sangat tahan pangan	96,3 persen	23.175.000,00			-	23.870.000,00
2	0	0	2.0		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Rencana Aksi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	23.175.000,00			-	23.870.000,00
2	0	0	2.0	000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan							
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	23.175.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		23.870.000,00
2	0	0			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100 persen	44.745.000,00			-	47.912.000,00
2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	26 Sampel	44.745.000,00			-	47.912.000,00
2	0	0	2.0	000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	22.245.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		22.912.000,00
2	0	0	2.0	000	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan							
						Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	22.500.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		25.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.721.236.000,00				6.130.312.000,00
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			5.721.236.000,00				6.130.312.000,00
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen	5.031.156.000,00			-	5.414.927.000,00
3	2	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	20.480.000,00			-	21.095.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.033.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		4.154.000,00
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.800.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		3.914.000,00
3	2	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.647.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		13.027.000,00
3	2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.145.076.000,00			-	4.603.832.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.090.114.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		4.547.318.000,00
3	2	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	53.200.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		54.700.000,00
3	2	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.762.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU		1.814.000,00

3	2	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000,00				-	5.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			5.000.000,00
3	2	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	399.000.000,00				-	312.500.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrikk/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			6.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	170.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			80.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.500.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			4.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			40.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			20.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			2.500.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	160.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			160.000.000,00
3	2	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	372.000.000,00				-	377.300.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			2.300.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	140.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			145.000.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	230.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			230.000.000,00
3	2	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	89.600.000,00				-	95.200.000,00
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	65.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			68.000.000,00
3	2	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	600.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			200.000,00
3	2	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	24.000.000,00	Kota Pekalongan,	DAU			27.000.000,00
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	63,27 Miliar Rupiah				-	286.521.000,00
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen	129.500.000,00				138.100.000,00
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi								
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Pekalongan,	DAU			15.000.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	119.500.000,00	Kota Pekalongan,	DAU			123.100.000,00
3	27	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen	59.760.000,00				61.560.000,00
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman								
						Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	59.760.000,00	Kota Pekalongan,	DAU			61.560.000,00
3	27	02	2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	71.050.000,00				73.100.000,00
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil								
						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	25.750.000,00	Kota Pekalongan,	DAU			26.500.000,00
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak								
						Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	45.300.000,00	Kota Pekalongan,	DAU			46.600.000,00
3	27	02	2.05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Pelayanan ULIB	100 persen	13.370.000,00				13.761.000,00
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak								
						Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	13.370.000,00	Kota Pekalongan,	DAU			13.761.000,00
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian dan peternakan dalam kondisi baik	67,57 persen	94.200.000,00				97.051.000,00
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Unit	94.200.000,00				97.051.000,00
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan								
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	94.200.000,00	Kota Pekalongan,	DAU			97.051.000,00
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular yang Tertangani	100 persen	277.800.000,00				286.113.000,00

3	2	0	2.0		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	650 Kasus	46.300.000,00				-	47.700.000,00	
3	2	0	2.0	000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	46.300.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			47.700.000,00	
3	2	0	2.0		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.750.000,00				-	26.513.000,00	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
						Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan	10.300.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			10.600.000,00	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Peredaran Produk Hewan									
						Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	15.450.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			15.913.000,00	
3	2	0	2.0		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.450.000,00				-	15.900.000,00	
3	2	0	2.0	000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	15.450.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			15.900.000,00	
3	2	0	2.0		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen	190.300.000,00				-	196.000.000,00	
3	2	0	2.0	000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	20.600.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			21.200.000,00	
3	2	0	2.0	001	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									
						Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1 Unit Usaha	169.700.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			174.800.000,00	
3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	12.400.000,00				-	12.800.000,00	
3	2	0	2.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	4 Kali	12.400.000,00				-	12.800.000,00	
3	2	0	2.0	000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4 Ha	12.400.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			12.800.000,00	
3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan nilai kelompok tani per tahun	52 persen	32.000.000,00				-	32.900.000,00	
3	2	0	2.0		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen	32.000.000,00				-	32.900.000,00	
3	2	0	2.0	001	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa									
						Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit	32.000.000,00	Kota Pekalonga n,	DAU			32.900.000,00	
J U M L A H								6.140.831.000,00						6.568.144.000,00

Berdasarkan tabel diatas bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan beserta pendanaan Tahun 2027 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Dijabarkan dalam kegiatan :
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 32.070.000,-
 - b. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 175.100.000,-
 - c. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 144.505.000,-
2. Program Penanganan kerawanan pangan. Dijabarkan dalam kegiatan :
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 23.175.000,-
3. Program Pengawasan keamanan pangan. Dijabarkan dalam kegiatan :
 - a. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 44.745.000,-
4. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Dijabarkan dalam kegiatan:
 - a. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 20.480.000,-
 - b. Administrasi keuangan, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp.4.145.076,000,-
 - c. Administrasi kepegawaian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp.5.000.000,-
 - d. Administrasi Umum, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 399.000.000,-
 - e. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 372.000.000,-
 - f. Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 89.600.000,-
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :

- a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 129.500.000,-
 - b. Pengelolaan sumberdaya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 59.760.000,-
 - c. Peningkatan mutu dan peredaran benih / bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 71.050.000,-
 - d. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 13.370.000,-
6. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
- a. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 94.200.000,-
7. Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dijabarkan dalam kegiatan :
- a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 46.300.000,-
 - b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 25.750.000,-
 - c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 15.450.000,-
 - b. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp.190.300.000,-
8. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
- a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 12.400.000,-
9. Program Penyuluhan pertanian. Dijabarkan dalam kegiatan :
- a. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan pagu anggaran penetapan sebesar Rp. 32.000.000,-

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Rancangan Awal Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan;
2. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025-2029, dimana seluruh program beserta indikatornya pada Renstra untuk tahun 2027 telah termuat dalam Renja 2027. Adapun pada level kegiatan dan sub kegiatan, tidak semua kegiatan maupun sub kegiatan yang ada pada Renstra untuk tahun 2027 termuat dalam Renja 2027. Selain itu terdapat penambahan *output* keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
3. Indikator *output* keluaran pada sub kegiatan selain mengacu pada indikator yang terdapat dalam Renstra Tahun 2025-2029 juga mengacu pada indikator *output* yang dibakukan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pertanian dan Pangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Pekalongan;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan Pertanian dan Pangan di Kota Pekalongan.

Dengan disusunnya Renja Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2027 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2027.

Pekalongan, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA PEKALONGAN



LILI SULISTYAWATI, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700711 199603 2 003